

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA BENAI KECIL DALAM MEMBERDAYAKAN
EKONOMI MASYARAKAT DESA BENAI KECIL KECAMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh : Zulfero Muhammad Sabri

Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa Benai Kecil. bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Benai Kecil dalam memberdayakan ekonomi dan mengetahui kendala nya. Adapun permasalahan yang terjadi di Benai Kecil adalah masalah ekonomi yang menyebabkan terdaftar menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Desa Benai Kecil dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan upaya peningkatan perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan study kepustakaan. Teori yang digunakan salah satunya adalah strategi pemberdayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan strategi pemberdayaan pemerintah Desa Benai Kecil Kecamatan Benai sebagai subyek yang berperan dalam mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah desa Benai Kecil. Pemberdayaan tersebut melalui tiga tahapan yakni tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah desa Benai Kecil adalah masyarakat yang kurang peduli, pemilihan lokasi, kurangnya keterampilan, dan anggaran dana. Adapun tujuan dari pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian masyarakat Desa Benai Kecil.

Kata kunci: Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat, kelompok Tani.

ABSTRAK

This study aim to explain policies carried out by the government of Benai Kecil Village, Benai district, Kuantan Singingi Regency. aims to determine the efforts made by the Benai Kecil village government in empowering the economy. and determine of the obstacles faced by the Benai Kecil village government in carrying out the empowerment program. The problems that occur in Benai Kecil are economic problems which cause people to be registered with Social Welfare Problems (PMKS) in Benai Kecil Village and the lack of community participation in various activities to improve the economy. This study uses a qualitative descriptive research method. The location of this research was conducted in the village of Benai Kecil, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The data collection techniques used were observation, interviews, documentation, and literature studies. One of the theories used is public policy strategy.

The results of this study indicate the empowerment strategy of the Benai Kecil village government, Benai District, as a subject who plays a role in managing and implementing regional development programs. The empowerment goes through three stages, namely the awareness stage, the capacity building stage, and the empowerment stage. The obstacles faced by the Benai Kecil village government are the people who don't care, location selection, lack of skills, and budgetary funds. The purpose of empowerment is to achieve the independence of the Benai Kecil village community.

Keywords: Village government, community empowerment, farmer groups.

Pendahuluan

Good Governance adalah prasyarat pemerintah untuk meningkatkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Diharapkan setiap organisasi pemerintah dapat menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan program sesuai dengan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mencapai sebuah tujuan sebuah negara atau bangsa memerlukan perencanaan. Menurut IGI (Dwi Susanto, 2015, p. 90) perencanaan adalah suatu proses dalam rangka menginformasikan dan mengimplementasikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dan prioritas-prioritas pembangunan melalui inetraksi di antara para eksekutif dan para anggota legislatif serta melalui birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil maupun masyarakat ekonomi.

Perencanaan merupakan bagian penting dalam suatu pembangunan di daerah. berdasarkan pendapat Waterston yang dikutip dari Conyers dalam (Masjudin Ashari, 2015) perencanaan adalah sebuah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. menurut (Adibowo, 2014) perencanaan diperlukan untuk meminimalisir permasalahan yang akan timbul. Berlakunya undang-undang desa No 6 Tahun 2014 memberikan berbagai implikasi penting dalam pembangunan desa. Dan pembangunan (Masjudin Ashari, 2015) memiliki makna sebagai pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka yang panjang sehingga dalam prosesnya memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat.

Perencanaan diperlukan dalam proses pembangunan, guna memberikan efektifitas dan efesiensi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu kegiatan yang bersifat nasional yang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah wilayah terencil di Indonesia sesuai dengan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan jika permasalahan perekonomian dapat diatasi, sehingga dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum dapat dilakukan salah satunya melalui penanggulangan kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi permasalahan dan perbincangan oleh khalayak umum. Hal ini terjadi karena kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang penting dan menjadi tanggung jawab oleh semua pihak dari tingkat lembaga pemerintah, kementerian bahkan individual masyarakat. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata disetiap daerah yang ada di Indonesia.

Pendekatan pemerintah oleh masyarakat saat ini menjadi cara yang paling populer, sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini belum memberikan hasil yang maksimal dalam penyelesaian permasalahan. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak

jarang menimbulkan permasalahan terbaru. Sehingga pemerintah berupaya agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong dan memotivasi serta membangkitkan potensi yang dimiliki.

Peran pemerintah desa adalah memantau suatu keadaan di setiap daerah dan memfasilitasi agar terjadi pengembangan ekonomi masyarakat desa. Menurut H.I.W. widjaja dalam (hantoro, 2013) desa adalah satuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai suatu kesejahteraan menyeluruh diperlukan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, sehingga dikeluarkan aturan mengenai desa.

Upaya meningkatkan kemajuan suatu desa diperlukan keterlibatan semua lapisan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatakan bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berlakunya Undang-Undang ini juga berdampak pada perubahan penting bagi desa atau kelurahan sehubungan dengan berlakunya undang-undang desa (UU No 6 Th 2014) antara lain;

- a. Desa/Kelurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan desa yakni
 1. Perencanaan pembangunan desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa.
 2. Rencana Pembangunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai penjabaran dari RPJMD dengan jangka waktu satu (1) tahun
- b. RPJMD maupun RKPMD yang disusun harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten.
- c. Penyusunan perencanaan pembangunan desa wajib menyertakan atau melibatkan masyarakat melalui kegiatan yang dikenal sebagai musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes).
- d. Perencanaan Pembangunan Desa harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa sebagaimana ditetapkan pada UU No.6 Th 2014
- e. Orientasi atau tujuan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana ditetapkan pada Ps 78. UU 6 Tahun 2014 yakni;
 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 2. Meningkatkan kualitas hidup
 3. Menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
 4. Pembangunan sarana dan prasarana desa
 5. Pengembangan ekonomi lokal

6. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berbagai ketentuan yang harus dilakukan oleh desa atau perangkat desa berdasar Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 merupakan hal yang baru dan sangat mungkin dalam implementasinya banyak mengalami berbagai hambatan atau kendala. Di lain pihak Undang-Undang ini telah dilaksanakan tahun 2015, dengan demikian desa atau kelurahan wajib untuk melakukannya termasuk dalam hal ini adalah menyusun Perencanaan Pembangunan Desa. terjadinya suatu pembangunan desa diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia. salah satu daerah di Indonesia di Provinsi Riau tepatnya kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Benai merupakan daerah dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Kuantan Hilir seberang yakni 124,66 KM² (Badan Pusat Statistik) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi) dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun 2016-2017 sebesar 1,04%.

Luas Areal perkebunan menurut Kecamatan Benai dan Jenis komoditas di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. Adapun tanaman yang ada adalah karet, kakao, kelapa sawit, dan aneka tanaman lainnya. Tanaman karet merupakan salah satu komoditas perkebunan penting yang memiliki prospek yang cerah untuk di budidayakan. Tanaman karet menghasilkan lateks sebagai bahan baku pembuatan produk sintesis seperti alat-alat kendaraan, alat kesehatan, perkakas dll; Kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan salah satu jenis tanaman penyegar yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kakao mempunyai peran penting

sebagai bahan dasar untuk produk pangan, kosmetik maupun kesehatan. Seluruh bagian tanaman kakao dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai ekonomis. Kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki akar tunggang. Radikula (bakal akar) pada bibit terus tumbuh memanjang ke arah bawah selama enam bulan terus-menerus dan panjang akarnya mencapai 15 meter. Tanaman kelapa sawit umumnya memiliki batang yang tidak bercabang.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah komoditas karet di Benai mencapai 4.777,05 Ha, Kakao mencapai 15,48 Ha, Kelapa Sawit 7.255,45 Ha, dan 200,57 Ha. Jumlah luas area perkebunan paling tertinggi adalah pada komoditas Kelapa sawit. sehingga hasil yang diperoleh juga lebih besarnya. tetapi berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa luas lahan di Benai ternyata belum memiliki hasil yang maksimal, karena terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki luas lahan lebih kecil tetapi memiliki hasil yang lebih besar.

Tabel dibawah ini menunjukkan adanya perbandingan luas yang ada pada beberapa kecamatan di Kuantan Singingi. Perbandingan tersebut sebagai tolak ukur pertumbuhan pertanian yang ada pada pada setiap kecamatan dengan luas tanah yang dimilikinya.

Data tersebut menunjukkan bahwa perkebunan di Kecamatan Benai memiliki luas lahan karet sebesar 4.777,05 Ha lebih kecil dibandingkan dengan kecamatan Pucuk Rantau yang hanya seluas 2.832,92 Tetapi hasil produksi menunjukkan angka yang lebih tinggi. Yang mana benai hanya memiliki

hasil produksi karet sebesar 1.779,23 Ton sedangkan pucuk Rantau mencapai hasil sebesar 2.831,92 Ton. Kemudian pada komoditas kakao Benai memiliki luas yang lebih besar dari pucuk rantau dan kuantan hilir, yang mana luas kecamatan Benai adalah 15,48 Ha sedangkan pucuk rantau dan kuantan Hilir 13,00 Ha dan 10,50 Ha. Tetapi hasil produksi menunjukkan bahwa Benai hanya mencapai 1,62 Ton sedangkan pucuk rantau dan Kuantan Hilir mencapai 2,38 Ton dan 1,73 Ton. Untuk luas aneka tanaman Benai mencapai 200,57 lebih luas jika dibandingkan dengan Pangean dan Logas Tanah Darat yang hanya 191,56 Ha dan 153,00 Ha. Tetapi hasil produksinya lebih besar yakni 149,35 ton 137,20 ton dan Benai hanya mencapai hasil 105,36 ton (Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi). Kurangnya produktivitas perkebunan di Kecamatan Benai dikhawatirkan akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Kecamatan Benai memiliki 16 desa yakni; Banjar benai, Banjar lopak, Benai, Benai kecil, Gunung kesiangan, Koto benai, Pulau ingu, Pulau kalimanting, Pulau lancung, Pulau tongah, Siberakun, Simandolak, Talontam, Tanjung, Tebing Tinggi, dan Ujung tanjung (Badan Pusat Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi).

Benai kecil merupakan salah satu desa di Kecamatan Benai yang masyarakatnya masih memiliki permasalahan ekonomi. Masyarakat benai masih banyak yang belum memiliki pekerjaan tetap. Sehingga terdapat orang yang masuk kedalam daftar masyarakat kurang mampu. Terdapat 34 masyarakat (pemerintah

desa benai kecil) yang masuk kedalam daftar kurang mampu. terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya permasalahan ekonomi, seperti kurangnya keterampilan, pendidikan dan tingkat kreatifitas masyarakat.

Permasalahan ekonomi yang terjadi di desa Benai Kecil memerlukan perhatian dari pemerintah agar dapat mengatasi permasalahan ini mengingat desa merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam. Dari sumber daya alam yang dimiliki desa bisa dijadikan sebagai bahan makanan dan bahan mentah. Sehingga sumber daya alam inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai sumber pendorong ekonomi masyarakat.

Benai kecil secara geografis memiliki potensi alam yang baik dan tanah yang subur. Sehingga hal tersebut sangat memungkinkan masyarakatnya untuk meningkatkan kualitas hasil pertaniannya. Mengingat benai kecil merupakan wilayah yang berdekatan dengan sungai Kuantan, sehingga hal ini menjadi poin tambahan dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Sumber daya ikan yang melimpah dari sungai memerlukan keterampilan khusus dari masyarakat untuk membudidayakannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan melalui dana desa.

Dana desa (Elvieta Manoppo, 2021, p. 4) merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana desa diharapkan dapat membantu masyarakat dari segi kebutuhan, pembangunan

sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi potensi desa.

Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian suatu desa adalah dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa. dengan adanya pembangunan desa maka peningkatan ekonomi masyarakat desa akan mengalami peningkatan. Kondisi ini kemudian akan memberikan cara baru berupa pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok. Pembangunan merupakan mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemelorotan nilai dan kesejahteraan.

Pemberdayaan masyarakat adalah bahwa ekonomi kerakyatan mengandung makna bahwa pembangunan ekonomi sebagian masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sebagai langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat (Swasono dalam rintuh, 2005).

Pemberdayaan menurut Suhendra merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamissecara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan semua potensi. Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Ife (dari buku Suhendra, 2006:77) adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*emporment aims to increase the power of diasadvantage*).

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antra subjek dan objek. Proses ini memntingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Menurut (Sumaryadi, 2005:11) Pemberdayaan mayarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakatnya seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”.

Menurut (Abu Huraerah, 2008:87) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternative solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Pada tahun 2015 pemerintah Desa Benai Kecil membuat sebuah kelompok tani guna meningkatkan perekonomian dan keterampilan masyarakat benai kecil dalam bidang pertanian dan pembuatan ikan salai. Program tersebut juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Kelompok tani di desa Benai Kecil disebut juga beken jaya yang berdiri pada 17 desember 2016. Memiliki aset berupa satu buah traktor mini, satu buah cultivator, dan satu unit processing (Pengolahan cabe).

Kelompok tani beranggotakan 16 orang . Berdasarkan hasil keputusan antara pemerintah Desa dan masyarakat maka terbentuklah kelompok Tani beserta dengan keanggotaanya dan visi misi kelompok tani.

Dalam mencapai suatu pemerintahan yang kuat dan masyarakat yang maju diperlukan adanya keselarasan tujuan masyarakat dan Pemerintah desa. sehingga menciptakan suatu kondisi yang mempermudah kemajuan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam mencapai tujuan ekonomi. sehingga pemerintah yang memiliki power dalam pembuatan kebijakan sangat diperlukan untuk memperoleh masyarakat dalam mencapai suatu kemajuan.

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan riset mengenai **“PEMERINTAH DESA BENAI KECIL DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA BENAI KECIL KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini akan membuat sebuah gambaran yang sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta terhadap suatu objek penelitian sehingga informasi menjadi lebih terperinci dalam mengeksplorasi (Gunawan, 2020). Jenis penelitian ini akan lebih mudah dalam memperoleh data dan menjawab permasalahan penelitian.

Penelitian ini tentang Strategi Pemerintah Desa Benai Kecil dalam

meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Desa Benai Kecil merupakan sebuah desa yang potensial di salah satu kecamatan Benai. Benai Kecil merupakan salah satu desa yang masih terdapat masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap dan memiliki keterampilan. Sehingga masyarakat belum memiliki pendapatan tetap.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang terkait. Data primer dikumpulkan guna mencapai tujuan penelitian. Adapun data primer diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. data sekunder didapatkan melalui bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, jurnal, buku, dokumentasi dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang termasuk data sekunder adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

- Penyuluhan pertanian dan Kelautan
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaga Agribisnis Pedesaan
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.140/2/2008 tentang pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

Penelitian kualitatif berhubungan erat dengan bagaimana tahapan yang ditempuh peneliti agar memperoleh data atau informasi. Sumber data primer adalah responden dan informan. Dalam memperoleh informan penulis menggunakan teknik purposif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria dan relevan dengan substansi penelitian. Informan ialah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga, dan data tentang hal-hal yang melembaga atau gejala umum (Agusta, 2018). Dengan arti kata informan adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian dengan analisis kualitatif. Menurut Hendryadi (2019:218) Penelitian Kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Metode penelitian kualitatif

bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Menurut Miles analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dengan aneka cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, dan pita rekaman untuk kemudian diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan Pemerintah Desa Benai Kecil dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa Benai Kecil.

1. Memberikan Penyadaran kepada Masyarakat Benai Kecil (Tahap Penyadaran)

pada tahap ini masyarakat yang menjadi subyek pemberdayaan diberi

penyadaran bahwa manusia memiliki potensi untuk dikembangkan. Berdasarkan hal ini pemerintah desa Benai Kecil melakukan penyuluhan guna meningkatkan partisipasi masyarakat desa Benai Kecil. penyuluhan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa Benai Kecil. penyuluhan itu sendiri memiliki makna berupa suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Tujuan dari penyuluhan tentang kegiatan pertanian adalah tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam membina dan memelihara lahan pertanian, berperan aktif mewujudkan kesehatan yang optimal sesuai hidup sehat baik fisik, mental dan sosial. Kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa benau kecil.

Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Penyuluhan diatas dilakukan oleh pemerintah kabupaten

Kuantan Singingi yang berkaitan dengan kelompok tani.

Penyuluhan tersebut dilakukan diberbagai acara kegiatan desa. hal tersebut diharapkan dapat membangkitkan semangat para masyarakat untuk meningkatkan potensinya. Mereka juga mulai ikut serta aktif yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah anggota kelompok tani di desa Benai Kecil.

Penyuluhan yang dilakukan diatas dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kuantan Singingi sebagai bentuk keseriusan pemerintah Benai Kecil dalam meningkatkan kualitas Sumber daya manusianya. penyuluhan tersebut berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan*". Yang menggunakan anggaran tahun 2017.

Kelompok tani juga berupaya memberikan pelatihan kepada masyarakat Benai Kecil berupa pembuatan pupuk kompos guna menunjang hasil yang maksimal terhadap pertanian.

Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti program ini adalah hasilnya yang tidak dapat dirasakan secara langsung melainkan memerlukan proses atau waktu yang cukup lama. Sehingga banyak masyarakat

yang tidak mengikuti program tersebut. permasalahan tersebut muncul akibat kurangnya pemahaman dari awal yang diberikan kepada masyarakat mengenai manfaat program kelompok tani.

Hal tersebut disadari oleh pemerintah desa Benai Kecil sehingga segera melakukan perbaikan guna mencegah terjadinya ketidakberhasilan program pemberdayaan ini. upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Benai Kecil adalah dengan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan dibentuknya kelompok tani. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat Benai Kecil mulai ikut serta aktif dalam menjalankan program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

2. Pemerintah Desa Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kelompok Tani (Tahap Pengkapasitasan)

Tahap pengkapasitasan dapat dicapai ketika masyarakat sudah memiliki kemampuan dalam menerima daya. Tahap ini sering juga disebut sebagai *capacity building* yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai. Guna meningkatkan upaya pemerintahan desa Benai Kecil melalui kelompok Tani, pemerintahan desa Benai Kecil memberikan

peningkatan fasilitas terhadap kelompok tani Beken Jaya. kelompok Tani Beken Jaya sebelumnya memiliki peralatan yang kurang lengkap. Sehingga dengan adanya peningkatan terhadap saran dan prasarana kelompok tani Beken Jaya akan memudahkan berbagai pencapaian ataupun tujuan bersama.

Kelompok tani Beken Jaya meningkatkan fasilitas dengan menggunakan dana desa dan berbagai bantuan dana dari pemerintah yang dialokasikan ke Kelompok Tani Beken Jaya. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat membantu. Peralatan desa yang diberikan adalah seperti traktor, yang mana traktor dapat digunakan oleh para petani guna memberikan kemudahan dalam menggemburkan tanah agar menjadi tanah yang mudah ditanami. Kelompok Tani yang diketuai oleh Yunisman memiliki visi dan misi meningkatkan sumber daya manusia di dalam bidang pertanian.

Sarana tersebut merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada kelompok sebagai penunjang kegiatan sistem pertanian yang akan dijalankan. Adanya sarana dan perasarana diharapkan mampu meningkatkan produktivitas para petani dalam menjalankan program kelompok tani ini.

Sarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut. Sementara prasarana adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama, dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin di capai.

Sarana dan prasarana pertanian merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung perkembangan atau kemajuan yang terjadi dalam sebuah kelompok pertanian. Mesin mesin tersebut memiliki banyak fungsi dari alat dan mesin pertanian untuk pengolahan tanah, menaikkan kadar air, serta dapat mengolah hasil pertanian. Banyak cara yang bisa digunakan oleh petani untuk mempermudah pekerjaan mereka salah satunya yaitu dengan cara menggunakan alat yang modern selain dapat memudahkan pekerjaan juga dapat mempersingkat waktu dan menikmati hasil produksi dalam bidang pertanian. Sarana-sarana tersebut harus sudah disiapkan sebelum memulai kegiatan budidaya tanaman.

Oleh karena itu peran kelompok tani dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi petani sangat penting ditengah keterbatasan yang dialami oleh para petani (Nur Fatimah, 2019).

3. Pemandirian Masyarakat dengan Melakukan Pemasaran terhadap Produk Pertanian (Tahap Pendayaan)

Tahap Pendayaan, merupakan tahap yang mana masyarakat sudah melakukan pengimplementasian Kedua Tahapan yang telah dilewati melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitas serta akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam tahap pendayaan yaitu dengan memberikan kepercayaan atas kapasitas sumberdaya yang dimiliki oleh sumber daya masyarakat Benai Kecil untuk berpartisipasi aktif dengan melakukan pemasaran produk pertanian kepada masyarakat Desa Benai Kecil. Pendayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Benai Kecil adalah dengan memberikan fasilitas berupa kesempatan untuk melakukan pemasaran produk hasil pertanian.

Pemasaran produk yang dilakukan oleh kelompok tani masyarakat Desa Benai Kecil sebagai bentuk upaya Pemerintah agar masyarakat bisa melakukan kemandirian

secara ekonomi. Pemerintah Mempercayai dengan adanya program ini dapat merubah mindset masyarakat tentang perekonomian.

Tahap Pendayaan merupakan tahap pemandirian masyarakat melalui tahap pemberdayaan yang sudah dilewati. Tahap pendayaan adalah upaya dalam memberikan daya, kekuatan dan kekuasaan berupa peluang atau kesempatan kepada masyarakat untuk dapat dikelola dengan baik. Pemberian kesempatan tersebut adalah dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan memasarkan produk.

Memasarkan produk merupakan suatu aktivitas dalam myampaikan barang atau jasa kepada para konsumen, dimana kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Produk yang dipasarkan oleh masyarakat merupakan produk hasil dari tanaman kelompok tani. Yang diharapkan dapat terus berjalan dan memberikan dampak positif.

Adapun Membantu menghubungkan kegiatan produksi dan konsumsi oleh konsumen serta masyarakat. Membuat perusahaan atau organisasi lebih kreatif dalam mengenalkan dan mempromosikan produknya.

Sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis diatas. dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut mulai dapat teratasi melalui penerapan tiga tahapan yang dilaksanakan, yakni tahap pendayaan., tahap pengkapasitasan, dan tahap penyadaran.

1. Tahap pendayaan, pada tahap ini dilaksanakan Penyuluhan tersebut dilakukan diberbagai acara kegiatan desa. Hal tersebut diharapkan dapat membangkitkan semangat para masyarakat untuk meningkatkan potensinya. Mereka juga mulai ikut serta aktif yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah anggota kelompok tani di desa Benai Kecil. Upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam tahap pendayaan yaitu dengan memberikan kepercayaan atas kapasitas sumberdaya yang dimiliki oleh sumber daya masyarakat Benai Kecil untuk berpartisipasi aktif dengan melakukan pemasaran produk pertanian kepada masyarakat Desa Benai Kecil. Pendayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Benai Kecil adalah dengan memberikan fasilitas berupa kesempatan untuk melakukan pemasaran produk hasil pertanian.
2. Tahap Pengkapasitasan, pada tahap ini pemerintah desa melakukan peningkatan

terhadap sarana dan prasarana nya melalui penambahan alat-alat yang membantu efektivitas dan efisiensi kerja seperti excavator dan alat bantu lainnya. Kelompok tani Beken Jaya meningkatkan fasilitas dengan menggunakan dana desa dan berbagai bantuan dana dari pemerintah yang dialokasikan ke Kelompok Tani Beken Jaya. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat membantu. Peralatan desa yang diberikan adalah seperti traktor, yang mana traktor dapat digunakan oleh para petani guna memberikan kemudahan dalam menggemburkan tanah agar menjadi tanah yang mudah ditanami.

3. Tahap Penyadaran, pada tahap ini masyarakat yang menjadi subyek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa manusia memiliki potensi untuk dikembangkan. Berdasarkan hal ini pemerintah desa Benai Kecil melakukan penyuluhan guna meningkatkan partisipasi masyarakat desa Benai Kecil. Penyuluhan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa Benai Kecil. Penyuluhan itu sendiri memiliki makna berupa suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang

seharusnya. Tujuan dari penyuluhan tentang kegiatan pertanian adalah tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam membina dan memelihara lahan pertanian, berperan aktif mewujudkan kesehatan yang optimal sesuai hidup sehat baik fisik, mental dan sosial. Kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa benau kecil.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Afiff. F & Abdullah, I. 2010. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhammad, S. 2012. Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Riant D. 2012 Public Policy: Jakarta

B. Jurnal

- Adibowo, R. (2014). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 115-126.
- Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Valuta*, 251-267.

- Anton, A. I. (2018). Impelementasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan di Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi. *jurnal unismupalu*, 1482-1490.
- Dinda nurhanifah, A. t. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dana Desa: Sebuah Kebijakan Pemerintah Aceh Barat". *Jurnal Public Policy*, 98-110.
- Dwi Susanto, D. A. (2015). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. *Jurna; Paradigma*, 73-91.
- Elvieta Manoppo, P. K. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 1-17.
- hantoro, N. M. (2013). perubahan status desa menjadi kelurahan dalam sistem ketatanegaraan. 237-254.
- Julian sonda, B. K. (2020). Impelementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 72-81.
- Khuswatun Chasanah, S. R. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 12-32.
- Masjudin Ashari, W. d. (2015). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 163-180.
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Bumdes. *jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, 140-145.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Civis*, 87-99.
- Rianto, K. P. (2021). Kebijakan Publik Desa Wisata Solusi Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mendukung Ekonomi Pertahanan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1441-1450.
- Rudiansyah, H. (2015). Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan dalam Rangka Meningkatkan Lesejahteraan Masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 363-372.
- Sri Handayani, A. R. (2016). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan tentang Ekonomi Kerakyatan melalui Pemberdayaan dan Penguatan Managemen Permodalan

Koperasi Berbasis Syariah di
desa Ceguk. *Nuansa*, 283-308.

Yantos. (2016). Kebijakan
Pemerintah Kabupaten
Kampar terhadap
Peningkatan Daya Saing
UMKM Desa Koto Mesjid
dalam Menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA). *Jurnal Risalah*, 32-
45.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
desa.

Profil kelompok tani desa benai kecil
kecamatan Benai kabupaten
Kuantan Singingi

Struktur kelompok tani budidaya
cabe “BEKEN JAYA” desa
benai kecil kecamatan Benai
kabupaten Kuantan Singingi